



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

Jalan Cimuncang No. 21D, Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul  
Kota Bandung, Jawa Barat 40125, [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id), info @pt-bandung.go.id

Nomor : 4719/W11-U/RA1.1/VII/2025

Bandung, 30 Juli 2025

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

**Kepada Yth.**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA**

**di-Majalengka**

Dalam rangka pelaksanaan peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Majalengka dimaksud untuk;
  - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4(empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Negeri Majalengka memperoleh nilai sebesar **77.60** atau **(BB) (Sangat Baik)**.
4. Nilai Tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun Sebelumnya	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,4	21.60
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,5	24.00
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,95	12.00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,5	20.00
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>76,4</b>	<b>77.60</b>
			<b>(BB)</b> <b>(Sangat Baik)</b>	<b>(BB)</b> <b>(Sangat Baik)</b>



NO	CATATAN
<b>A. Perencanaan Kinerja</b>	
1.	Belum dilengkapi dengan sasaran kinerja seluruh pegawai selama tahun 2024;
2.	Belum dilengkapi dengan dokumen matrik pendanaan pada renstra;
3.	Belum dilengkapi dengan dokumen rapat capaian kinerja berkala selama tahun 2024(undangan,daftar hadir notulensi foto kegiatan);
<b>B. Pengukuran Kinerja</b>	
1.	Belum dilengkapi keterangan/analisa SMART pada Dokumen Indikator Utama;
2.	Dokumen rapat capaian kinerja baru terdapat 1 bulan perlu dilengkapi dokumen rapat capaian kinerja selama tahun 2024;
3.	Belum dilengkapi dengan dokumen hasil rapat internal menindaklanjuti hasil rakerda dan evaluasi kinerja, dokumen rapat tinjauan manajemen dan dokumen reviu SOP;
4.	Belum dilengkapi dengan dokumen hasil revisi anggaran dari kebijakan pusat analisis dan surat usulan revisinya;
<b>C. Pelaporan Kinerja</b>	
1.	Belum terdapat tanda tangan dan stempel pimpinan pada dokumen laporan kinerja;
2.	Belum dilengkapi dengan Dokumen Permenpan No 53 Tahun 2022 sebagai pedoman dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas;
3.	Belum dilengkapi dengan notulensi evaluasi LKJIP tahun 2024 dan analisa penyusunan SAKIP tahun 2025;
<b>D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	
1.	Belum terdapat SK SEKMA No 878 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di lingkungan badan peradilan;
2.	Belum dilengkapi dengan SDM Pelaksana yang telah memiliki Sertifikat Bimtek SAKIP;
3.	Belum dilengkapi dengan dokumen rapat berjenjang;



NO	REKOMENDASI
<b>A. Perencanaan Kinerja</b>	
1.	Agar dilengkapi dengan sasaran kinerja seluruh pegawai selama tahun 2024;
2.	Agar dilengkapi dengan dokumen matrik pendanaan pada renstra;
3.	Agar dilengkapi dengan dokumen rapat capaian kinerja berkala selama tahun 2024(undangan,daftar hadir notulensi foto kegiatan);
<b>B. Pengukuran Kinerja</b>	
1.	Belum dilengkapi keterangan/analisa SMART pada Dokumen Indikator Utama;
2.	Agar dilengkapi dokumen rapat capaian kinerja selama tahun 2024;
3.	Agar dilengkapi dengan dokumen hasil rapat internal menindaklanjuti hasil rakerda dan evaluasi kinerja, dokumen rapat tinjauan manajemen dan dokumen reuiu SOP;
4.	Agar dilengkapi dengan dokumen hasil revisi anggaran dari kebijakan pusat analisis dan surat usulan revisinya;
<b>C. Pelaporan Kinerja</b>	
1.	Agar terdapat tanda tangan dan stempel pimpinan pada dokumen laporan kinerja;
2.	Agar dilengkapi dengan Dokumen Permenpan No 53 Tahun 2022 sebagai pedoman dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas;
3.	Agar dilengkapi dengan notulensi evaluasi LKJIP tahun 2024 dan analisa penyusunan SAKIP tahun 2025;
<b>D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	
1.	Agar terdapat SK SEKMA No 878 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di lingkungan badan peradilan;
2.	Agar dilengkapi dengan SDM Pelaksana yang telah memiliki Sertifikat Bimtek SAKIP;
3.	Agar dilengkapi dengan dokumen rapat berjenjang;



Demikian hasil evaluasi Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2024, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Majalengka, adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya, dan kepada Pengadilan Negeri Majalengka segera menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP kepada Ketua Pengadilan Tinggi, terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I di Jakarta.
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I di Jakarta.

